

SEJARAH SINGKAT BERDIRINYA FAKULTAS HUKUM

Dikutip dari Buku Pedoman Program Pendidikan Strata-I Fakultas Hukum Universitas Indonesi Th. 1984/1985.

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909. Dengan nama *Rechtsschool* sekolah ini didirikan di Batavia, sebagai realisasi permintaan dari Djajadin-ingrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Pada tahun 1924 sekolah ini ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama *Rechtshogeschool* atau *Faculteit der Rechtsgeleerheid*. Kedua nama ini dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu, yaitu *Hooger Onderwijs-Ordonnantie* (S. 1924 No. 456, dirubah antara lain oleh S. 1926 No. 333 dan No. 502, S. 1927, No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, S. 1934 No. 529).

Menurut peraturan tersebut di atas, matakuliah yang diberikan pada *Rechtshogeschool* adalah (pasal 9) : Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-

bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Rumawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal duapuluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah.

Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaat-examen*). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doctoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (*richtingen*) yang dapat dipilih mahasiswa, yaitu : Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologis-Ekonomis. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten* (pasal 10). Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi : a) advokat dan

pengacara, serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan b) pegawai pemerintahan serta dalam bidang pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan Rechtshogeschool telah dikeluarkan dalam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.

Pada masa pendudukan Jepang (1942 - 1945) Rechtshogeschool ditutup dan baru dibuka kembali pada tahun 1946 dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari Nood-universiteit van Indonesie (dibuka 21 Januari 1946). Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan NICA (Netherlands Indies Civil Administration). Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas, yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum dan Sastra. Meskipun sebagian dari Kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke daerah R.I. yang berpusat di Yogyakarta) tetapi bagian besar kegiatan masih berada di Jakarta di bawah pimpinan antara lain : Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, Prof. dr.

Slamet Iman Santoso dan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, maka pada tanggal 30 Januari 1950 telah dikeluarkan Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1950, yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia. Pada tanggal 2 Februari 1950 terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran, Jalan Salemba No. 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru, yang bernama Universitas Indonesia (kemudian menjadi Universitas Indonesia). Universitas ini merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesie dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakultet Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan : Prof.

Mr. Djokosoetono dan Panitera : Prof. Mr. Dr. Hazairin).

Kurikulum dan sistem pendidikan yang berlaku di Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat pada dasarnya mengambil dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen. Perubahan terjadi pada tahun 1969 dengan dilakukannya penyesuaian kepada keputusan-keputusan Konperensi Dinas Antara Fakultas Hukum Pembina se-Indonesia (Jogyakarta, 29 - 31 Agustus 1968) dan kemudian penyesuaian dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0198/U/1972, tanggal 30 Desember 1972, tentang kurikulum minimal. Namun demikian, pola kurikulum maupun sistem pendidikan tidak berbeda jauh dengan pola lama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen, kecuali adanya penambahan matakuliah, diintroduksikannya sistem studi terpimpin dan pembagian tahun kuliah dalam semester. Perubahan yang cukup mendasar dilandaskan pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0124/U/1979, tanggal 8 Juni 1979 tentang sistem kredit semester (peraturan tahun 1972 dan 1979 ini telah dirubah lagi dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 26 Juni 1982, yaitu No. 0211/U/1982 dan No. 0212/U/1982). Berdasarkan

peraturan-peraturan terakhir inilah telah dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 121/SK/D/FH/7/82, tanggal 31 Juli 1982. Perlu pula diperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 30/DJ/KEP/1983, tanggal 27 April 1983 tentang Kurikulum Inti Program Pendidikan Sarjana Bidang Hukum.

Perubahan dalam organisasi fakultas terjadi pada tahun 1959 dengan dibukanya Jurusan Publisistik. Sedangkan pada tahun 1960 fakultas hukum telah membuka pendidikan dengan kuliah sore yang dikenal dengan nama Bagian Extension Course atau Fakultas Hukum Bagian Sore. Dengan demikian sejak tahun 1961, maka fakultas hukum terdiri atas Bagian Pagi dan Bagian Sore (yang lebih diperuntukkan bagi mahasiswa yang bekerja). Pembukaan Bagian Extension ini didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono No 4/915/Ib/61/K tanggal 1 Agustus 1961. Kemudian nama fakultas diganti menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat. Dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perguruan Tinggi No. 42, tertanggal 6 Mei 1968, maka Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat (dikenal pula dengan singkatan FH & IPK) dipecah

menjadi Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Masyarakat (mulai 1 Pebruari 1968 dan selesai sepenuhnya pada 1 April 1969, kemudian dikenal dengan nama Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan sekarang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Suatu bagian pendidikan yang sudah sejak semula berada di fakultas adalah pendidikan notariat (lebih dikenal dengan nama Jurusan Notariat). Pendidikan ini telah ada sejak penggabungan tahun 1950 (pada Universiteit van Indonesie pendidikan ini dipimpin oleh Prof. Mr. Slamet, dan pada masa Universitas Indonesia pimpinan awal dipegang oleh Prof. Mr. Tan Eng Kiam dan Prof. Mr. R. Soedja). Sejak tahun 1965, dengan dihapusnya ujian negara untuk tingkat I dan tingkat II pendidikan notariat, maka pendidikan ini secara resmi bersifat universitas dan disebut sebagai Jurusan Notariat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan lama pendidikan dua tahun. Sekarang jurusan ini dikenal sebagai Program Pendidikan Keahlian Notariat.

Pada tahun 1979 Fakultas Hukum mulai merencanakan pembukaan suatu program pendidikan pasca sarjana (Strata-2) guna memberikan pendidikan spesialisasi dan persiapan penulisan disertasi kepada lulusan fakultas hukum. Untuk itu telah dibentuk Panitia Kerja

Persiapan Pembentukan/Penyusunan Program Pasca Sarjana pada FH-UI yang diketuai oleh Mardjono Reksodiputro, SH. MA. Menurut SK Dekan No. 49 tahun 1979 (20 Oktober 1979) tugas panitia harus selesai dalam waktu enam bulan. Karena tugas ini belum selesai pada jangka waktu tersebut, maka diadakanlah perubahan personalia dan perpanjangan jangka waktu dengan SK Dekan No. 52 dan No. 63 tahun 1980 dengan Ketua yang sama. Tugas panitia dapat diselesaikan pada tanggal 16 Januari 1981 dengan menyarankan kurikulum, dosen serta pembagian dalam tiga program studi. Tugas persiapan selanjutnya dilakukan oleh suatu panitia baru yang diketuai oleh Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH dengan SK Dekan No. 82 tahun 1981 (19 Januari 1981), yang selanjutnya pemimpin program ini selaku Koordinator Bidang Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana UI.

Dalam tahun ajaran 1982/1983 dengan persetujuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah dimulai pula suatu program baru pada Bidang Studi Ilmu Hukum di atas, yang dikenal sebagai Kegiatan Pengumpulan Kredit (KPK), dan yang merupakan kerjasama antara Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro (Semarang). Melalui KPK ini diselenggarakanlah di UN-DIP Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang mempunyai kurikulum sama tetapi dosen

yang agak berbeda dibandingkan dengan program studi serupa yang diselenggarakan di Universitas Indonesia.

Urutan Dekan Fakultas Hukum selama ini adalah sebagai berikut : Prof. R. Djokosoetono, SH (alm. 1950 — 1962), Prof. Soejono Hadinoto, SH (alm. 1962 — 1964), Prof. R. Subekti, SH (1964 - 1966), Prof. Oemar Seno Adji, SH (1966 — 1968), Prof. R. Soekardono, SH (alm. 1968—1970), Padmo Wahjono, SH (1970 — 1978), Ny. S.J. Hanifa Wiknjosastro, SH (1978—1984) dan Mardjono Reksodiputro, SH. MA. (1984—sekarang).

Sumber :

1. Buku Pedoman Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Jakarta : Agustus 1969).
2. Jaarboekje der Rechtshoogeschool te Batavia 1936 (Batavia : Landsdrukkerij, 1936).
3. Team Redaksi jurusan Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Sejarah Singkat Universitas Indonesia (Jakarta. Universitas Indonesia, 1967).

Pada Penerbitan Mimbar Hukum yang akan datang, akan dimuat sejarah berdirinya Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.